

KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri

MEMPERCEPAT PEMULIHAN, MEMPERKUAT PEMERINTAHAN DAERAH

Sinergi Nasional dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

Oleh
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

**SUMATERA
BANGKIT!**

KOLABORASI
PEMULIHAN
REKONSTRUKSI
KETANGGUHAN
MASA DEPAN



Bersama Pulih
Bersama Bangkit



Pemerintahan Daerah
Lebih Tangguh



Masyarakat Sejahtera
Indonesia Maju



KEMENTERIAN DALAM
NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BENCANA ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT: PERSOALAN NASIONAL DENGAN DAMPAK DAERAH

- Dampak bencana tidak berhenti pada kerusakan rumah atau infrastruktur.
- Bencana mengganggu:



Pelayanan
pemerintahan



Kesehatan
dan pendidikan



Konektivitas



Distribusi
barang



Kegiatan
ekonomi



Mata
pencaharian



Stabilitas sosial
masyarakat

- Karena dampaknya lintas sektor dan lintas wilayah, penanganannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang berjalan sendiri-sendiri.
- Pemulihan harus menghubungkan kebutuhan masyarakat, kapasitas pemerintah daerah, dukungan kementerian/lembaga, dan ketersediaan pembiayaan nasional.

DATA DAN ANGKA PENGUAT



Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan pemulihan dalam skala **puluhan triliun rupiah**, yang menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tiga provinsi merupakan pekerjaan besar dan multidimensi.



Bappenas mencatat rencana aksi kementerian/lembaga untuk pemulihan tiga provinsi mencapai sekitar **Rp56,3 triliun**, mencakup **2.108 kegiatan untuk periode tiga tahun**. Angka ini merupakan kebutuhan/rencana aksi lintas K/L, berdasarkan Kemendagri.

SUMATERA BANGKIT!



INDONESIA
TANGGUH



TASK FORCE: MEMPERKUAT KERJA BERSAMA, BUKAN MENAMBAH SEKAT BIROKRASI

- Pembentukan Task Force merupakan bentuk kehadiran dan perhatian langsung negara terhadap percepatan pemulihan.
- Task Force diperlukan untuk memastikan:



Kebijakan pusat dan kebutuhan daerah berjalan searah



Program kementerian/lembaga tidak tumpang tindih



Dukungan anggaran dan sumber daya dapat disinergikan



Hambatan lintas sektor dapat segera diselesaikan



Kemajuan pemulihan dapat dikendalikan secara bersama.

- Task Force bukan pengganti kewenangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- Task Force harus menjadi ruang konsolidasi kebijakan, koordinasi, pengendalian, dan penyelesaian persoalan strategis.

DASAR HUKUM



Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026

tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.



Keppres
ditetapkan pada
8 Januari 2026.



Pendanaan pelaksanaan tugas bersumber dari **APBN dan sumber lain yang sah** sesuai ketentuan.





PEMULIHAN HARUS BERPIHAK PADA MASYARAKAT DAN BERBASIS PRIORITAS

Prioritas pemulihan harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan kelompok yang paling rentan.

1

Keselamatan masyarakat



Perlindungan dari bencana susulan



Keamanan lokasi hunian



Akses evakuasi



Penanganan wilayah rawan banjir, longsor, dan tsunami

2

Penyediaan Kebutuhan Dasar



Kesehatan



Pendidikan



Air bersih



Sanitasi



Listrik



Komunikasi



Transportasi

3

Pemulihan Ekonomi



Pertanian



Perkebunan



Perikanan



Perdagangan



UMKM



Pasar dan pusat distribusi

4

Perlindungan kelompok rentan



Masyarakat miskin



Anak-anak



Lansia



Penyandang disabilitas



Perempuan



Masyarakat terpencil



Keluarga yang kehilangan mata pencaharian

ANALISIS PEMULIHAN INFRASTRUKTUR ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT

Data Laporan Harian Satgas PRR Sumatera | 15 September 2026

1. KONDISI INFRASTRUKTUR TIGA PROVINSI

Jenis Infrastruktur	Terdampak	Fungsional	Belum Fungsional	Tingkat Fungsionalitas
 Jalan nasional	107	107	0	100%
 Jalan daerah	2.421	2.291	130	94,6%
 Jembatan nasional	43	43	0	100%
 Jembatan daerah	1.184	821	363	69,3%



4. RINCIAN INFRASTRUKTUR DAERAH PER PROVINSI

Provinsi	Jalan Daerah			Jembatan Daerah		
	Terdampak	Fungsional	Belum Fungsional	Terdampak	Fungsional	Belum Fungsional
Aceh	1.638	1.545	93	655	380	275
Sumatera Utara	616	607	9	366	344	22
Sumatera Barat	167	139	28	163	97	66
Total	2,421	2.291	130	1.184	821	363

JARINGAN NASIONAL TELAH PULIH, TANTANGAN UTAMA PADA INFRASTRUKTUR DAERAH

2. PEMBANGUNAN JEMBATAN OLEH SATGAS TNI AD

Provinsi	Bailey (Selesai/Total)	Armco (Selesai/Total)	Perintis (Selesai/Total)	Total	Selesai	Dalam Proses
Aceh	43/60	134/136	42/105	301	219	82
Sumatera Utara	19/31	77/77	62/111	219	158	61
Sumatera Barat	13/16	30/30	27/31	77	70	7
Total	75/107	241/243	131/247	597	447	150

3. PEMBANGUNAN JEMBATAN OLEH SATGAS POLRI

Provinsi	Perintis (Selesai/Total)	Bailey (Selesai/Total)	Total	Selesai	Dalam Proses	Perencanaan
Aceh	21/22	4/4	26	25	1	0
Sumatera Utara	80/82	-	82	80	2	0
Sumatera Barat	10/14	2/4	18	12	0	6
Total	111/118	6/8	126	117	3	6

TEMUAN UTAMA

- 1. Jalan dan jembatan nasional telah kembali fungsional 100%.
- 2. Masih terdapat 130 ruas jalan daerah dan 363 jembatan daerah yang belum fungsional.
- 3. Jembatan daerah menjadi hambatan utama konektivitas (tingkat fungsionalitas 69,3%).
- 4. Aceh menanggung beban pemulihan terbesar (275 jembatan daerah belum fungsional).
- 5. Satgas TNI AD dan Polri telah membangun 723 unit jembatan, 564 unit selesai (78%), 159 unit dalam proses/perencanaan.
- 6. Pemulihan infrastruktur harus terintegrasi dengan akses layanan dasar dan pemulihan ekonomi masyarakat.

REKOMENDASI

- 1. Tetapkan 363 jembatan daerah yang belum fungsional sebagai prioritas nasional.
- 2. Susun profil setiap jembatan (lokasi, fungsi, penerima manfaat, kebutuhan anggaran, penanggung jawab, target waktu).
- 3. Integrasikan data K/L, TNI AD, Polri, pemerintah daerah dalam satu dashboard pemulihan.
- 4. Pastikan jembatan sementara memiliki rencana pembangunan permanen.
- 5. Fokus pada dampak terhadap konektivitas masyarakat, layanan dasar, distribusi logistik, dan pemulihan ekonomi.

KESIMPULAN

Pemulihan infrastruktur nasional telah mencapai 100%, namun infrastruktur daerah, khususnya jembatan, masih menjadi pekerjaan besar. Percepatan penyelesaian jembatan daerah menjadi kunci pemulihan konektivitas dan kebangkitan ekonomi masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

PEMULIHAN PASCABENCANA BANJIR DAN LONGSOR ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT

Bantuan Sosial | Perumahan | Perdagangan | UMKM & Pembiayaan KUR

Pulih Bersama
Lebih Kuat

Data per
15 September 2026

Sumber: Kemensos, BPS,
BNPB, Kemendag

1 BANTUAN ISI HUNIAN, JAMINAN HIDUP (JADUP) DAN STIMULAN EKONOMI

Sumber: Kemensos dan BPS

Provinsi	Jenis Bantuan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Alokasi KK
Aceh	Isi Hunian	423.939.000.000	417.057.000.000	98,38%	136.948
	Jaminan Hidup	653.251.950.000	578.097.100.000	88,50%	119.846
	Stimulan Ekonomi	693.775.000.000	678.915.000.000	97,86%	136.948
Sumatera Utara	Isi Hunian	45.084.000.000	41.106.000.000	91,18%	15.028
	Jaminan Hidup	74.628.000.000	75.649.950.000	101,37%	14.064
	Stimulan Ekonomi	75.140.000.000	68.510.000.000	91,10%	15.028
Sumatera Barat	Isi Hunian	17.610.000.000	10.176.000.000	57,79%	5.870
	Jaminan Hidup	27.908.100.000	21.053.250.000	75,44%	5.714
	Stimulan Ekonomi	29.350.000.000	16.960.000.000	57,79%	5.870

Catatan: Realisasi Jaminan Hidup dan alokasi KK Stimulan Ekonomi Sumatera Barat perlu verifikasi lebih lanjut.



2 BANTUAN KERUSAKAN RUMAH

Sumber: BNPB

Provinsi	Rumah Rusak Ringan		Rumah Rusak Sedang	
	Unit	@ Nilai (Rp)	Unit	@ Nilai (Rp)
Aceh	17.742	266.130.000.000	12.919	387.570.000.000
Sumatera Utara	2.332	34.980.000.000	1.228	36.840.000.000
Sumatera Barat	811	12.165.000.000	375	11.250.000.000
Total	20.885	313.275.000.000	14.522	435.660.000.000

DANA TUNGGU HUNIAN (DTH)

Provinsi	Jumlah KK	Realisasi
Aceh	13.706	100%
Sumatera Utara	4.288	100%
Sumatera Barat	2.992	100%
Total	20.986	100%



DTH 20.986 KK telah terealisasi 100%

3 PEMULIHAN PASAR RAKYAT

Sumber: Kemendag

Provinsi	Pasar Terdampak	Sudah Beroperasi	Belum Beroperasi	Tingkat Aktivasi
Aceh	127	115	12	90,55%
Sumatera Utara	57	57	0	100%
Sumatera Barat	26	26	0	100%
Total	210	198	12	94,29%



198 dari 210 pasar telah beroperasi.
12 pasar yang belum beroperasi seluruhnya berada di Aceh.

4 UMKM DAN PERDAGANGAN DIGITAL

Sumber: Kemendag

Total Transaksi E-Commerce 22 Januari – 26 Agustus 2026		40.634.395 transaksi
Provinsi	Jumlah Produk	Jumlah Transaksi
Aceh	1.396	161.823
Sumatera Utara	631	23.438.086
Sumatera Barat	101	5.534.212
Total (rincian)	2.128	29.134.121



Catatan: Total transaksi agregat (40.634.395) belum sesuai dengan penjumlahan per provinsi. Perlu rekonsiliasi data.

5 PEMBIAYAAN UMKM – DEBITUR KUR TERDAMPAK

Sumber: Kemendag

Perkembangan Pemetaan Debitur KUR 3 Provinsi

Periode	Jumlah Debitur	Outstanding (Rp)
26 Januari 2026	111.601	6,02 Triliun
10 Maret 2026	193.703	11,22 Triliun
Perubahan	+82.102 (+73,6%)	+5,20 Triliun (+86,4%)

Rincian Debitur KUR per Provinsi (per 10 Maret 2026)

Provinsi	Jumlah Debitur	Outstanding (Rp)
Aceh	121.984	7,15 Triliun
Sumatera Utara	44.049	2,43 Triliun
Sumatera Barat	27.670	1,64 Triliun
Total	193.703	11,22 Triliun



TEMUAN UTAMA

- 1 Aceh menjadi pusat kebutuhan pemulihan terbesar.
- 2 Sumatera Barat memerlukan percepatan realisasi bantuan.
- 3 Pemulihan pasar relatif lebih cepat, namun 12 pasar di Aceh masih belum beroperasi.
- 4 Pemulihan ekonomi perlu berlanjut melalui penguatan UMKM dan penanganan 193.703 debitur KUR (Rp 11,22 triliun).
- 5 Integrasi data lintas sektor dan verifikasi angka diperlukan untuk akurasi pemulihan.

DAMPAK DAN PEMULIHAN SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN PASCABENCANA BANJIR DAN LONGSOR ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT

Pulih Lahan, Pulih Laut
Bangkit Bersama

Data per
31 Agustus 2026
Sumber: Kementerian Pertanian
dan Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP)

1 LAHAN PERSAWAHAN TERDAMPAK

Sumber: Kementerian Pertanian

Provinsi	Kab/Kota Terdampak	Rusak Ringan (Ha)	Rusak Sedang (Ha)	Rusak Berat (Ha)	Total (Ha)
Aceh	19	27.483	13.405	16.283	57.171
Sumatera Utara	15	22.274	4.500	4.354	31.128
Sumatera Barat	13	2.802	1.100	2.541	6.443
Total	47	52.559	19.005	23.178	94.742

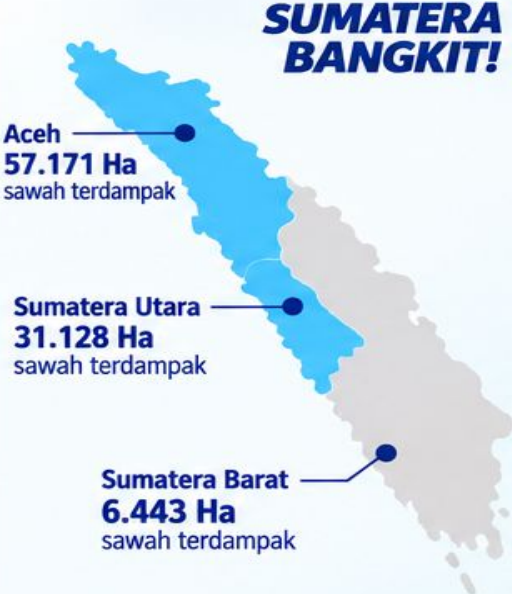
2 PROGRES PEMULIHAN LAHAN SAWAH

Sumber: Kementerian Pertanian

Realisasi Keseluruhan			Progres per Provinsi			
Indikator	Luas (Ha)	Persentase	Provinsi	Target (Ha)	Proses Konstruksi (Ha)	Selesai Konstruksi (Ha)
Target pemulihan	52.624	100%	Aceh	31.464	28.170	17.796
Realisasi DRT/SID	39.409	75%	Sumatera Utara	7.336	7.336	6.931
Dalam proses konstruksi	39.406	75%	Sumatera Barat	3.902	3.902	3.902
Selesai konstruksi	28.626	54,4%				



Catatan: Data selesai pemulihan dan proses pemulihan bersifat kumulatif.



3 LAHAN TAMBAK TERDAMPAK

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Provinsi	Luas Tambak Terdampak (Ha)
Aceh	30.417,17
Sumatera Utara	575,27
Sumatera Barat	255,90
Total	31.248,34



97%
lahan tambak terdampak berada di Aceh

4 KERAMBA TERDAMPAK

Provinsi	Unit
Aceh	1.953
Sumatera Utara	40
Sumatera Barat	60
Total	2.053

5 NELAYAN TERDAMPAK

Provinsi	Orang
Aceh	2.077
Sumatera Utara	628
Sumatera Barat	37
Total	2.742

6 KAPAL IKAN TERDAMPAK

Provinsi	Unit
Aceh	1.864
Sumatera Utara	519
Sumatera Barat	18
Total	2.401

7 PETAMBAK GARAM TERDAMPAK

Total (1 Provinsi)
1.095 orang

8 UNIT PENGOLAHAN IKAN TERDAMPAK

Provinsi	Unit
Aceh	95
Sumatera Utara	198
Sumatera Barat	71
Total	364

9 RINGKASAN TOTAL DAMPAK

 94.742 Ha lahan sawah terdampak	 31.248,34 Ha lahan tambak terdampak	 2.053 keramba terdampak	 2.742 nelayan terdampak	 2.401 kapal ikan terdampak	 1.095 petambak garam terdampak	 364 unit pengolahan ikan terdampak
---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--

10 TEMUAN UTAMA

- 1 Aceh menanggung dampak terbesar pada lahan sawah (57.171 Ha), tambak (30.417,17 Ha), keramba, nelayan, dan kapal ikan.
- 2 Progres pemulihan sawah secara keseluruhan mencapai 54,4% selesai konstruksi.
- 3 Sumatera Utara memiliki unit pengolahan ikan terdampak terbanyak (198 unit).
- 4 Pemulihan lahan dan sarana produksi perlu dipercepat untuk mengembalikan produktivitas dan kehidupan masyarakat.

"Pertanian Pulih,
Ketahanan Pangan Kuat"

Dari Lahan yang Pulih
Menuju Masyarakat yang Lebih Tangguh

"Laut Pulih,
Ekonomi Pesisir Bangkit"

STATUS PEMULIHAN LAYANAN DASAR LAINNYA PASCABENCANA BANJIR DAN LONGSOR ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT

*Pulih Bersama
Lebih Kuat*

Data per
31 Agustus 2026

Sumber: Kementerian/Lembaga
terkait

1 KELISTRIKAN

Sumber: Kementerian ESDM



Provinsi	Status Layanan
Aceh	100% Menyala
Sumatera Utara	100% Menyala
Sumatera Barat	100% Menyala

Listrik telah pulih sepenuhnya di seluruh wilayah terdampak.

2 BBM DAN ELPJI

Sumber: Danantara



Provinsi	SPBU	SPBE	Agen LPG
Aceh	156	11	131
Sumatera Utara	406	46	383
Sumatera Barat	147	14	172
Total	709	71	686



Seluruh SPBU, SPBE, dan agen LPG telah berfungsi **100%**.

**SUMATERA
BANGKIT!**

3 INTERNET / TELEKOMUNIKASI

Sumber: Kementerian Komdigi



Provinsi	BTS Terdampak	BTS Berfungsi	Pemulihan
Aceh	3.815	3.815	100%
Sumatera Utara	5.845	5.845	100%
Sumatera Barat	1.483	1.483	100%
Total	11.143	11.143	100%



Seluruh **11.143** BTS terdampak telah pulih dan kembali beroperasi normal.

4 SUMUR BOR

Sumber: Kementerian PU & TNI



Provinsi	Jumlah	Selesai	Proses	Capaian
Aceh	1.434	920	514	64,2%
Sumatera Utara	182	137	45	75,3%
Sumatera Barat	221	141	80	63,8%
Total	1.837	1.198	639	65,2%



Sebanyak **1.198** sumur bor telah selesai, **639** masih dalam proses.

5 MCK (SANITASI)

Sumber: Kementerian PU & TNI



Provinsi	Jumlah	Selesai	Proses	Capaian
Aceh	72	54	18	75,0%
Sumatera Utara	139	128	11	92,1%
Sumatera Barat	46	26	20	56,5%
Total	257	208	49	80,9%



Pembangunan MCK terus dilakukan untuk mendukung sanitasi masyarakat.

6 PENGUNGSI DI TENDA

Sumber: BNPB



Provinsi	Jumlah Pengungsi di Tenda
Aceh	Nihil
Sumatera Utara	Nihil
Sumatera Barat	Nihil



Berdasarkan data 13–14 September 2026, tidak ada pengungsi yang berada di tenda.

7 PEMBERSIHAN LUMPUR

Sumber: Kementerian PU



Provinsi	Sasaran Lokasi	Selesai	Dalam Proses	Capaian
Aceh	650	650	0	100%
Sumatera Utara	23	23	0	100%
Sumatera Barat	29	29	0	100%
Total	702	702	0	100%



Seluruh 702 lokasi pembersihan lumpur telah selesai ditangani.

8 NORMALISASI SUNGAI

Sumber: Kementerian PU



Provinsi	Sasaran	Selesai	Dalam Proses	Capaian
Aceh	31	10	21	32,3%
Sumatera Utara	48	16	32	33,3%
Sumatera Barat	58	10	48	17,2%
Total	137	36	101	26,3%

Sebaran kewenangan:

- 93 sungai kewenangan pusat
- 44 sungai kewenangan daerah

9 NORMALISASI MUARA

Sumber: Kementerian PU



Provinsi	Sasaran	Selesai	Dalam Proses	Capaian
Aceh	23	2	21	8,7%
Sumatera Utara	11	2	9	18,2%
Sumatera Barat	4	3	1	75,0%
Total	38	7	31	18,4%

Sebaran kewenangan:

- 24 muara kewenangan pusat
- 14 muara kewenangan daerah

TEMUAN UTAMA

1

Listrik, BBM, LPG, dan internet telah pulih 100%.

2

702 lokasi pembersihan lumpur telah selesai.

3

Pembangunan sumur bor dan MCK masih terus berlangsung.

4

Normalisasi sungai dan muara perlu percepatan.

MEMBANGUN KEMBALI DENGAN LEBIH AMAN, BUKAN SEKADAR MENGEMBALIKAN KONDISI LAMA

DARI
KERENTANAN

MENUJU
MASA DEPAN
YANG LEBIH AMAN



Rekonstruksi harus menjadi momentum memperbaiki kualitas pembangunan.



Jangan membangun kembali infrastruktur, permukiman, dan fasilitas publik pada lokasi atau dengan standar yang kembali menciptakan kerentanan.

SETIAP PEMBANGUNAN KEMBALI HARUS MEMPERHATIKAN:



Peta risiko



Tata ruang



Kondisi geologi dan hidrologi



Standar bangunan



Akses evakuasi



Sistem peringatan dini



Daya dukung lingkungan



Kemampuan daerah untuk memelihara hasil pembangunan

PEMULIHAN HARUS MENGHASILKAN DAERAH YANG:



Lebih aman



Lebih tertata



Lebih siap



Lebih adaptif



Lebih tangguh

*Daerah Lebih Aman
Masyarakat Lebih Sejahtera*

UNTUK
GENERASI
YANG LEBIH TANGGUH

REKONSTRUKSI
LEBIH AMAN
LEBIH TANGGUH
UNTUK MASA DEPAN



Dari Pemulihan
Hingga Kesiapsiagaan
untuk Semua Daerah

DARI PEMULIHAN SUMATERA MENUJU KETANGGUHAN NASIONAL

Belajar dari Bencana, Membangun Indonesia yang Lebih Aman

Berpengalaman
Lebih Siap
Lebih Tangguh

POKOK PIKIRAN



Penanggulangan
bencana tidak boleh
bersifat reaktif.



Setiap bencana harus
menjadi sumber
pembelajaran bagi
daerah lain.



Pengalaman di Aceh,
Sumatera Utara, dan Sumatera
Barat harus digunakan untuk
memperkuat kesiapsiagaan
nasional.



ANTISIPASI GEMPA DI NUSA TENGGARA TIMUR

- 1 Memperkuat perencanaan berbasis risiko.
- 2 Memastikan fasilitas publik memperhatikan standar bangunan tahan gempa.
- 3 Memperkuat kesiapan sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan kantor pemerintahan.
- 4 Memperjelas jalur evakuasi dan titik kumpul.
- 5 Meningkatkan simulasi dan literasi kebencanaan.
- 6 Memperhitungkan risiko tsunami, kekeringan, keterisolasian, dan tantangan logistik.



PENCEGAHAN KARHUTLA DI KALIMANTAN

- 1 Memperkuat pemantauan titik panas dan peringatan dini.
- 2 Meningkatkan pengawasan kawasan rawan, terutama lahan gambut.
- 3 Memperkuat kesiapan personel, peralatan, sumber air, dan posko.
- 4 Mendorong pembasahan kembali dan pemulihan ekosistem gambut.
- 5 Memperkuat koordinasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan aparat.
- 6 Menyiapkan perlindungan terhadap dampak kabut asap pada kesehatan, pendidikan, transportasi, dan ekonomi.

Daerah Tangguh
Indonesia Maju

LEBIH SIAP
LEBIH AMAN
LEBIH SEJAHTERA



PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH: SATU TANGGUNG JAWAB, BERBEDA PERAN

*Kolaborasi
untuk Indonesia
yang Lebih Tangguh*



PEMERINTAH PUSAT

- 1 Menetapkan arah dan prioritas nasional.
- 2 Menyediakan dukungan kebijakan dan pembiayaan.
- 3 Memastikan standar teknis dan keselamatan.
- 4 Menggerakkan sumber daya lintas kementerian/lembaga.
- 5 Menyelesaikan persoalan yang melampaui kewenangan daerah.
- 6 Melakukan pengawasan dan pengendalian.



PEMERINTAH PROVINSI

- 1 Mengoordinasikan kabupaten/kota.
- 2 Menyatukan data dan kebutuhan.
- 3 Memastikan keterhubungan program antarwilayah.
- 4 Mengoordinasikan dukungan sumber daya.
- 5 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan.



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

- 1 Memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- 2 Memastikan data lapangan.
- 3 Menetapkan prioritas daerah.
- 4 Menjaga keberlanjutan pelayanan publik.
- 5 Mengintegrasikan pemulihan dalam perencanaan dan penganggaran.
- 6 Memastikan pelaksanaan serta pelaporan di lapangan.



GOTONG ROYONG NASIONAL: MENGGERAKKAN SELURUH KEKUATAN PEMULIHAN



POKOK PIKIRAN

1

Pemerintah tidak dapat memulihkan seluruh dampak bencana tanpa dukungan berbagai pihak.

2

Kolaborasi harus dibangun dalam kerangka tanggung jawab yang jelas.



KONTRIBUSI MULTIPIHAK



TNI dan Polri

Dukungan personel, keamanan, akses, logistik, dan mobilisasi.



Dunia usaha

Dukungan pembiayaan, material, peralatan, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi.



Perguruan tinggi

Kajian risiko, pemetaan, desain, inovasi, dan pendampingan.



Organisasi masyarakat dan lembaga kemanusiaan

Pendampingan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan masyarakat.



Media

Penyebarluasan informasi, edukasi, dan pengawasan publik.



Masyarakat terdampak

Partisipasi dalam penentuan kebutuhan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil pemulihan.





PEMBIAYAAN DAN KAPASITAS PEMERINTAHAN HARUS BERJALAN BERSAMA



PEMBIAYAAN PEMULIHAN

Memadai, Tepat Waktu, dan Terintegrasi

- 1 Pemulihan membutuhkan pembiayaan yang memadai, tepat waktu, dan terintegrasi.
- 2 Anggaran harus diarahkan pada kebutuhan prioritas dan tidak boleh terfragmentasi oleh sekat program.
- 3 Dukungan pembiayaan dapat bersumber dari:



APBN



APBD



Belanja tidak terduga



Realokasi atau
refocusing anggaran



Transfer ke daerah



Skema pembiayaan
sesuai ketentuan



Hibah



Dukungan dunia usaha



Mitra pembangunan



DUKUNGAN KAPASITAS

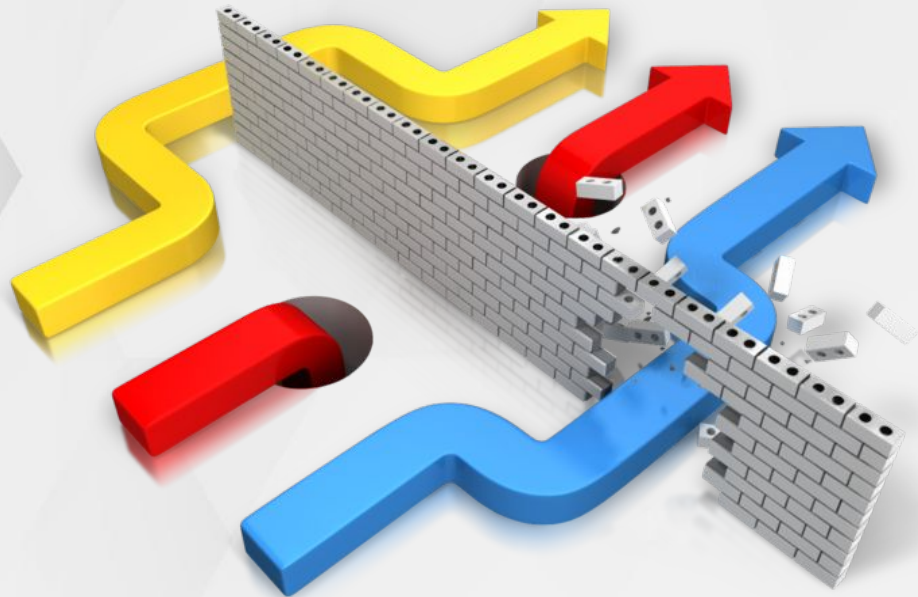
- 1 SDM teknis dan aparatur pemerintahan.
- 2 Peralatan dan alat berat.
- 3 Material pembangunan.
- 4 Fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- 5 Sarana air bersih dan sanitasi.
- 6 Komunikasi dan logistik.
- 7 Sistem data dan pemantauan.
- 8 Dukungan pengadaan dan pengelolaan keuangan.



Kebutuhan pemulihan tiga provinsi
berada pada skala **puluhan triliun rupiah.**



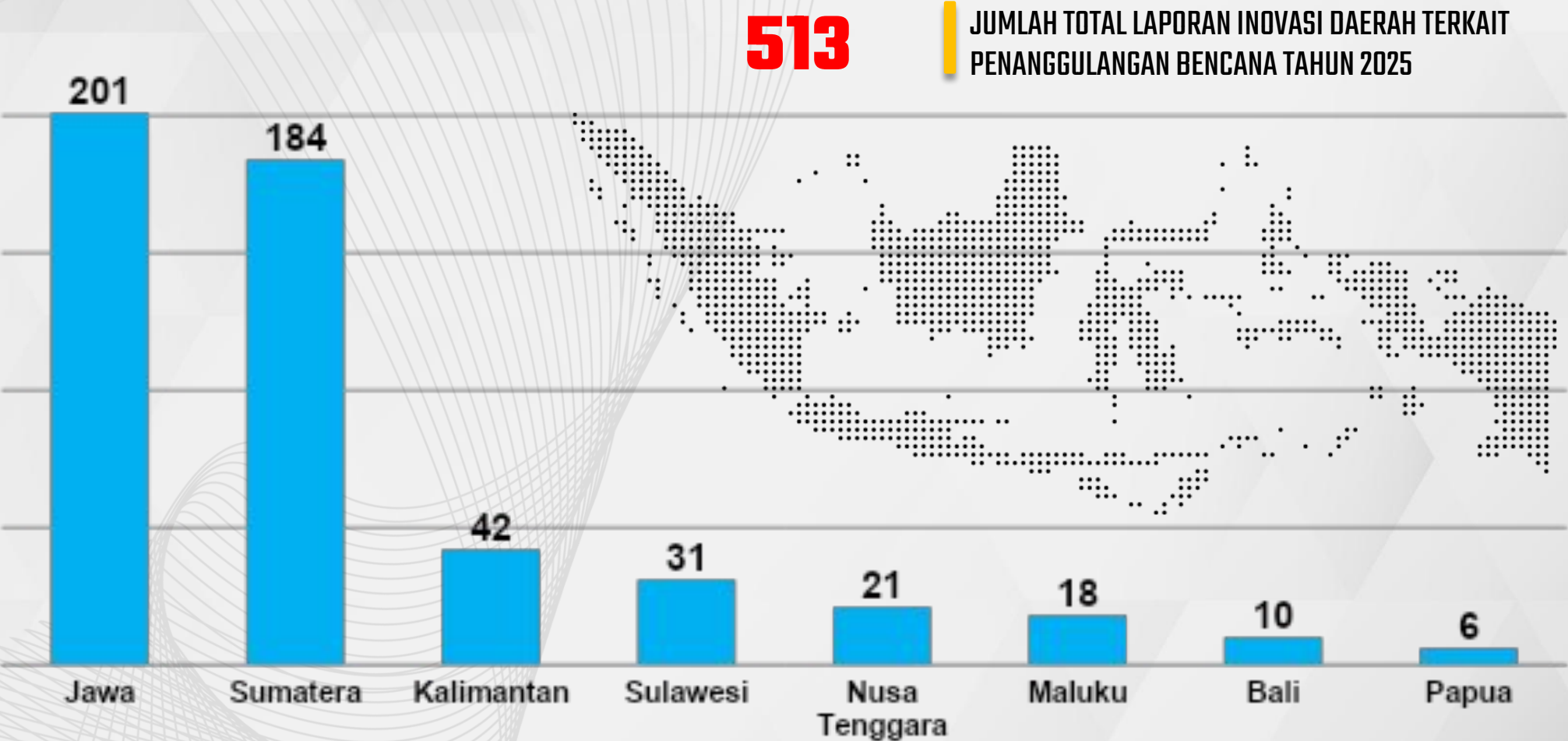
PMK Nomor 29 Tahun 2026 memperkuat pengaturan terkait transfer ke daerah dan pinjaman PEN untuk mendukung percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi.



LAPORAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA



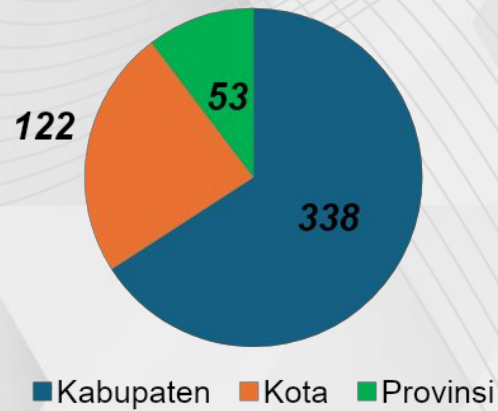
SEBARAN LAPORAN INOVASI DAERAH TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025



Batasan : raw Laporan Inovasi daerah Tahun 2025 dengan keyword bencana, kebakaran, longsor, early warning, banjir, tanah longsor, evakuasi, tanggap darurat, tsunami, kesiapsiagaan, gempa, destana, kekeringan, lahar, kebakaran, peringatan dini, damkar, karhutla,pcc



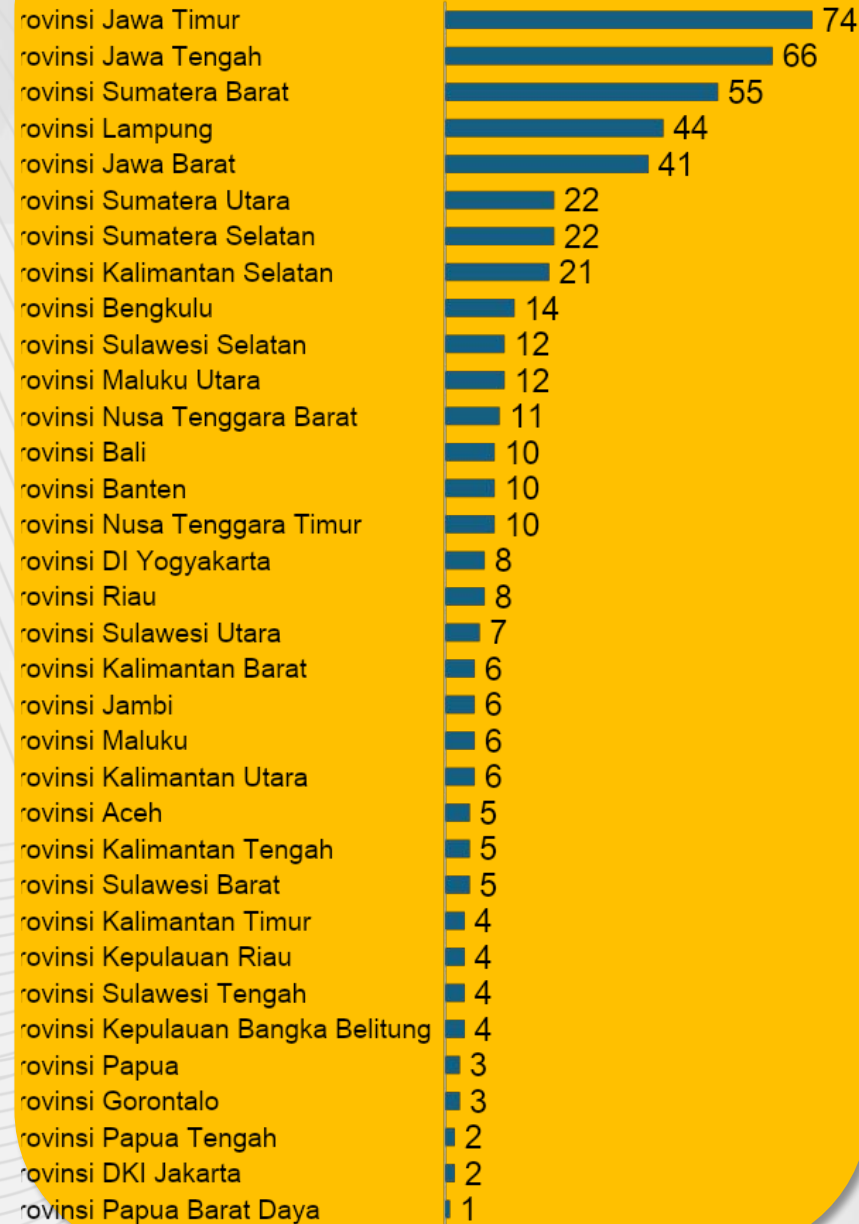
Jumlah Inovasi Terkait Kebencanaan berdasarkan Klaster



Terdapat **241 pemerintah daerah** melaporkan **513 inovasi** terkait kebencanaan yaitu:

- **24 provinsi** melaporkan **53 inovasi**
- **173 kabupaten** melaporkan **338 inovasi**
- **44 kota** melaporkan **122 inovasi**

Jumlah Inovasi Terkait Kebencanaan berdasarkan Wilayah Provinsi



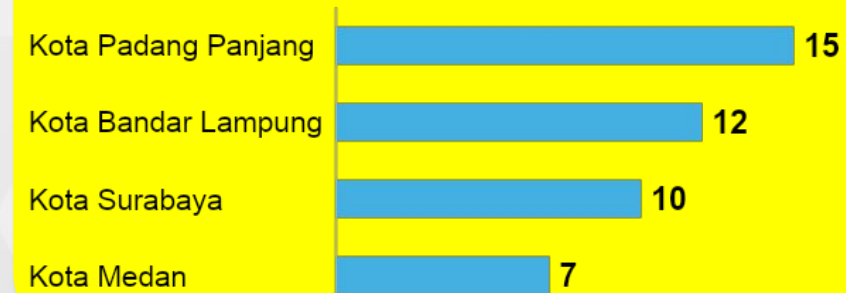
4 Pemerintah Daerah dengan Inovasi Terkait Kebencanaan Terbanyak (Provinsi)



5 Pemerintah Daerah dengan Inovasi Terkait Kebencanaan Terbanyak (Kabupaten)



4 Pemerintah Daerah dengan Inovasi Terkait Kebencanaan Terbanyak (Kota)





KECAMATAN JATIPURNO
Pemerintah Kabupaten Wonogiri

SIPENA

Sistem Informasi Peta Bencana Kecamatan Jatipurno

Kabupaten Wonogiri

RANCANG BANGUN INOVASI

*Inovasi
untuk Kecamatan
yang Lebih Tangguh*



**PETA BENCANA
DATA LEBIH TERINTEGRASI
MASYARAKAT LEBIH SIAGA**

1

DASAR HUKUM



- UU 5/2014 tentang ASN
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah
- PP 11/2017 tentang Manajemen PNS
- Perbup Wonogiri 138/2021 tentang Inovasi Daerah.

2

PERMASALAHAN



- Minimnya sistem digital pemetaan titik rawan bencana
- Data berbagai desa belum terintegrasi
- Akses masyarakat terhadap informasi risiko belum cepat dan akurat.

3

ISU STRATEGIS



- **GLOBAL:** Perubahan iklim, peningkatan bencana, urbanisasi, krisis air, dan keterbatasan kesiapsiagaan.
- **NASIONAL:** Infrastruktur, teknologi, koordinasi, kapasitas SDM, partisipasi, anggaran, dan standarisasi data.
- **LOKAL:** Data untuk mitigasi, respons cepat, keputusan, alokasi sumber daya, dan evaluasi.

4

SEBELUM INOVASI



- Pencatatan belum tertib
- Laporan hanya berbentuk fisik
- Banyak kejadian masif, khususnya longsor, tidak dilaporkan.

5

SETELAH INOVASI



- Pencatatan melalui aplikasi web
- Laporan tersedia secara fisik dan dalam basis data
- Operator khusus mencatat setiap kejadian.

6

KEUNGGULAN



- Aplikasi komunitas berbasis web
- Interaksi pemerintah-masyarakat
- Alat kontrol informasi
- Media sosialisasi program
- Riwayat bencana tersimpan melalui pelaporan tertib.

7

KEBARUAN



Sejak 2024, operator tidak wajib berasal dari aparatur pemerintah. Masyarakat dan pemuda dapat menjadi operator untuk mempercepat pelaporan.

8

CARA PENGGUNAAN



1. Buka situs SIPENA
2. Masuk dengan username dan password
3. Klik "Laporan" untuk melihat data bencana
4. Klik "Buat Laporan", lengkapi data, lalu submit

9

TUJUAN



- Memetakan lokasi rawan bencana seluruh desa
- Menyatukan data dalam satu platform
- Memudahkan pemantauan dan tindak lanjut
- Meningkatkan akses informasi dan kesiapsiagaan.

10

MANFAAT



- Peta risiko digital yang lengkap dan terstruktur
- Integrasi data bencana antardesa
- Informasi potensi risiko terbuka bagi masyarakat.



AKSES APLIKASI

<http://sipena.kec.jatipurno.wonogirikab.go.id>



PROFIL INOVASI

https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/95807

*Bersama Mewujudkan
Kecamatan Jatipurno yang Lebih Aman*





BAHAUPAN

Bantuan Perbaikan Hunian Pascabencana

Kabupaten Balangan • 19 Agustus 2024

KABUPATEN
BALANGAN



BAHAUPAN

BANTUAN PERBAIKAN HUNIAN PASCA
BENCANA

RANCANG BANGUN INOVASI

1

DASAR HUKUM



UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah •
PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah •
Permendagri 104/2018 •
Permensos 9/2018 tentang SPM Bidang Sosial •
Permensos 1/2018 tentang Bantuan Sosial Perbaikan Hunian

2

PERMASALAHAN



Administrasi dan alur layanan panjang; laporan tidak selalu sesuai kondisi lapangan; pendataan dan penyaluran bantuan lambat; akses warga jauh terbatas; serta sumber daya Dinas Sosial belum optimal.

3

ISU STRATEGIS



Penanggulangan bencana merupakan prioritas nasional dan bersifat lintas sektor. Pemerintah perlu memahami masalah sosial serta menghadirkan layanan perlindungan dan pemulihan yang terintegrasi.

4

PENJARINGAN IDE



Peningkatan akses dan literasi Keluarga Penerima Manfaat, pengondisian khusus, serta pemanfaatan drone untuk pemetaan dan aplikasi digital untuk pelaporan.

5

PEMILIHAN IDE



BAHAUPAN dipilih sebagai strategi perlindungan dan jaminan sosial untuk mempercepat bantuan perbaikan hunian, mengurangi keluhan penyaluran, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta Asta Cita ke-6.

6

METODE PEMBARUAN



SEBELUM:
Pendataan lambat dan kurang akurat sehingga bantuan berisiko tidak tepat sasaran dan pemulihan tertunda.



SESUDAH:
Bantuan disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran agar korban segera membangun kembali hunian.

7

KEBARUAN



- Pemenuhan kebutuhan dasar tempat tinggal secara cepat dan tepat sekaligus mendukung pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis korban.

8

TAHAPAN INOVASI



PERSIAPAN:
Tim, aktor dan jejaring, SOP, pedoman teknis, uji coba.



PENETAPAN:
SK Kepala Dinas Sosial Nomor 13/001/SK/Disas Sosial/2024, 2 Januari 2024.



PELAKSANAAN:
Sosialisasi • Pendataan korban • Koordinasi Forkopimda, Forkopimcam, dan aparat desa • Penyaluran bantuan.

9

TUJUAN



- Hunian aman dan layak
- Pemulihan lebih cepat
- Risiko kesehatan berkurang
- Stabilitas sosial dan ekonomi.

10

MANFAAT



- Kesejahteraan dan kualitas hidup meningkat
- Rasa aman dan stabilitas psikologis
- Pemulihan ekonomi lokal
- Solidaritas dan kohesi sosial.



AKSES PROFIL LENGKAP

https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/133934



BERSAMA
DESA
UNTUK
MAGELANG
TANGGUH

INVESTOR A+

Inovasi Vetiver Sistem untuk Tanah Longsor – Berbasis Arisan Plus

Kabupaten Magelang • 11 Juli 2025

Desa Kuat, Lereng Aman, Masa Depan Berkelanjutan

*Alam Terjaga
Masyarakat Sejahtera*

Dokumentasi penanaman vetiver di lereng oleh masyarakat Kabupaten Magelang

RANCANG BANGUN INOVASI

1 LATAR BELAKANG



Sejak 2019, BPBD Kabupaten Magelang mengembangkan penanaman vetiver sebagai rehabilitasi wilayah terdampak longsor. Metode ini murah, mudah diterapkan, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

2 PERMASALAHAN



Lahan miring rawan longsor masih kerap ditangani melalui konstruksi fisik seperti tanggul dan talut yang membutuhkan biaya besar. Kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pengurangan risiko juga perlu diperkuat.

3 ISU STRATEGIS



Pengurangan risiko longsor berbasis vegetasi, rehabilitasi tanah pascabencana, pemberdayaan desa, serta penguatan kerja sama antardesa.

4 GAGASAN INOVASI



Vetiver ditanam, dirawat, dan dibudidayakan oleh desa. Hasil panen bibit kemudian diberikan secara bergiliran kepada desa lain melalui sistem arisan.

5 MEKANISME ARISAN PLUS



TAHUN 1:
Desa A
menyangga
Desa B

TAHUN 2:
Desa A + B
menyangga
Desa C

TAHUN 3:
Desa A + B + C
menyangga
Desa D

Berlanjut ke desa rawan longsor berikutnya.

6 PERAN & KELEMBAGAAN



- BPBD sebagai inisiator dan pendamping
- Kerja sama dilegalkan melalui Perjanjian Kerja Sama antardesa
- Kolaborasi berkembang ke bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

7 KEBARUAN



Mengubah paradigma mitigasi dari dominasi konstruksi fisik menuju solusi vegetatif yang murah, mudah dibudidayakan, berkelanjutan, dan digerakkan masyarakat.

8 TEKNIK BUDIDAYA



- Tanam di lahan terbuka
- Siram rutin pada bulan pertama
- Dapat ditumpangsarikan
- Dapat ditanam di bawah pohon berkambium.

9 TUJUAN



- Mengurangi risiko longsor
- Merehabilitasi dan memperbaiki struktur tanah
- Meningkatkan kesadaran, peran, dan kemandirian masyarakat desa.

10 MANFAAT



- Akar vetiver mengikat tanah
- Kewaspadaan meningkat
- Kepedulian antardesa menguat
- Lahan miring lebih produktif
- Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berkembang.

HAMPIR 30 DESA
TELAH MENDAPAT PENDAMPINGAN

*Vetiver untuk
Lereng yang Lebih Aman*



AKSES PROFIL LENGKAP

https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/144925





TERPANA

Tim Reaksi Cepat Penanganan Gangguan dan Bencana
Kabupaten Bulungan



SIAGA
TANGGAP
MELINDUNGI
MASYARAKAT

RANCANG BANGUN INOVASI



1. DASAR HUKUM

PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, khususnya layanan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Selaras dengan tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.



2. PERMASALAHAN

Beragam gangguan, kebakaran, bencana alam, dan bahaya teknologi dapat terjadi tiba-tiba. Penanganan trantibum belum optimal karena keterbatasan personel dan layanan di tingkat kecamatan.



3. KONDISI AWAL

70%

2020–2024: sekitar 70% pelanggaran tertangani

50%

50% kecamatan belum memiliki personel Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

13

13 kejadian kebakaran: 45% terlayani; hanya 6 kejadian memenuhi response time



4. ISU STRATEGIS

- Bulungan Reaksi Cepat
- Sistem komunikasi terpadu
- Teknologi analisis situasi darurat
- Pelatihan tim
- Edukasi kesiapsiagaan masyarakat.

CAKUPAN GEOGRAFIS

10
kecamatan

74
desa

7
kelurahan

7
desa blank spot



5. SEBELUM INOVASI

Pelatihan kecamatan belum terstruktur; kemampuan prediksi dan respons personel terbatas; Satpol PP dan Pemadam Kebakaran belum bersinergi.



6. SETELAH INOVASI

Sistem komunikasi real-time dan terintegrasi; pelatihan komprehensif; koordinasi respons lebih baik; pemahaman masyarakat mengenai pencegahan, kedaruratan, dan pemulihan meningkat.



7. KEUNGGULAN / KEBARUAN

- Respons kebakaran dan gangguan trantibum hingga kecamatan lebih cepat
- Pemetaan mitigasi, pelanggaran Perda, dan penanganan swakarsa
- Sinergi Satpol PP–Pemadam Kebakaran.



8. BISNIS PROSES



9. TUJUAN

- Sinergi antar-stakeholder
- Kondisi keamanan yang kondusif
- Kesadaran dan budaya hukum masyarakat
- Kebakaran serta gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tertangani.



10. MANFAAT

- Suasana Tibumtranmas mendukung kesejahteraan dan pembangunan
- Penanganan pelanggaran Perda, pengamanan, mitigasi, dan bencana meningkat
- Profesionalisme anggota semakin kuat.



AKSES PROFIL LENGKAP

https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/138764



TERIMA KASIH